

MAHASISWA DAN POLITIK;

Telaah atas Gerakan Reformasi Mahasiswa Indonesia Tahun 1998

¹ Neneng Sobibatu Rohmah, ² Chanifia Izza Millata¹ Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman² Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman¹ neneng.sobibatu@unsoed.ac.id, ² chanifia.izza@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Kajian tentang gerakan mahasiswa bukanlah sesuatu disiplin akademis dan bahkan belum menjadi keahlian khusus yang diakui tetapi kepustakaan tentang bidang ini banyak sekali dan sangat variatif untuk dipandang sebagai suatu bidang studi. Dalam sejarah perkembangan perpolitikan di Indonesia, mahasiswa disebut sebagai *Agent of Change* dan *Agent of Control Social*. Karena dianggap sebagai kaum intelektual yang dapat menyongsong perubahan kearah yang lebih baik, juga sangat efektif sebagai kelompok yang kuat untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam apa yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa untuk menuntut reformasi pada tahun 1998. Selain itu, apa dampak dari gerakan mahasiswa 1998 terhadap kehidupan bangsa dan perpolitikan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah gerakan sosial dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa Indonesia 1998 disebut sebagai gerakan sosial karena menjadi salah satu gerakan yang memiliki kekuatan dalam melakukan perubahan sistem politik di Indonesia. Hal ini pula ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru dan lengsernya Soeharto sebagai presiden. Disini terlihat tuntutan perubahan itu lahir ke era reformasi karena melihat kebijakan yang ada bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Tuntutan gerakan reformasi 1998 ini tidak hanya berdampak pada sistem politik, namun juga pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia.

Kata Kunci; Gerakan Mahasiswa. Tuntutan Reformasi. Dampak Gerakan Reformasi.

A. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa di Indonesia selalu menarik untuk dikaji karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Bahkan, keberadaan gerakan mahasiswa selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Meskipun sudah berkali-kali "diberangus" oleh penguasa di setiap jamannya, gerakan mahasiswa selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional. Secara historis, peran mahasiswa dalam

perubahan politik di Indonesia sangatlah besar. Misalnya, perubahan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru pada tahun 1965, peran mahasiswa sangat besar dalam melegitimasi kekuasaan Sukarno (Francois Raillon, 1985). Begitu pula pada tahun 1998, tanpa kehadiran ribuan mahasiswa di gedung MPR/DPR, sangatlah sukar untuk membuat Soeharto mundur dari jabatan presiden.

Gerakan mahasiswa tidak semata sebagai kumpulan mitos dan slogan yang selalu didengung-dengungkan para aktivis. Akumulasi hal tersebut justru melenakan mahasiswa dalam zona nyamannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya posisi yang jelas dan tegas dimana mahasiswa berada di tengah masyarakat (Philips G. Altbach, 1988). Maka, untuk melakukan hal tersebut sebuah analisa tentang posisi mahasiswa secara teoritis sangat dibutuhkan, pun juga sebagai prakteknya dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat.

Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan yang ditandai dengan tumbanganya Orde Baru dengan ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan ini diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu Gedung DPR/MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto.

Dari narasi diatas, dalam kajian ini akan memotret bagaimana kondisi sosial politik saat itu kira-kira di penghujung kepemimpinan presiden Soeharto dan bagaimana lahirnya gerakan mahasiswa untuk menuntut reformasi. Selain itu, akan dibahas juga dampak dari gerakan mahasiswa 1998 baik untuk perkembangan sejarah Indonesia maupun untuk keberadaan peran mahasiswa di Indonesia selanjutnya. Oleh karenanya, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Apa yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa untuk menuntut reformasi pada tahun 1998? Dan apa dampak dari gerakan mahasiswa 1998 terhadap kehidupan bangsa dan perpolitikan di

Indonesia? Kiranya bahasan sederhana ini dapat membuka jalan akan sebuah petualang intelektual yang lebih luas dan mendalam.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan karena mampu menggambarkan latarbelakang gerakan mahasiswa untuk menuntut reformasi pada tahun 1998 serta dampak dari gerakan mahasiswa 1998 terhadap kehidupan bangsa dan perpolitikan di Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau kajian literatur. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari berbagai data, artikel, arsip dokumen, dan buku-buku literatur serta penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, berita di media yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gerakan Sosial

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat dan merupakan sebagai reaksi menginginkan perubahan kebijakan (Donatella della Porta & Mario Diani, 2006). Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Disini terlihat tuntutan perubahan itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Donatella della Porta and Mario Diani dalam bukunya *Social Movements In Introduction*, menyajikan perspektif-perspektif dalam beberapa tingkat analisis yang terstruktur: konflik dan basis gerakan struktural, keyakinan bersama identitas kolektif, dinamika organisasi dan jaringan sosial, dan struktur politik yang merupakan konsep sentral dalam pendekatan proses politik. Menurutnya, gerakan sosial tidak hanya

dipandang sebagai kegiatan politik, tetapi sebagai suatu identitas kolektif. Individu-individu membentuk identitas yang sama ketika mereka bersama-sama berbagi ketidakpuasan dan bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu (Donatella della Porta & Mario Diani, 2006).

Gerakan sosial juga diartikan oleh Darmawan Triwibowo sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama (Darmawan Triwibowo, 2006). Secara singkat, dapat disimpulkan, bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok dalam mendukung atau menentang perubahan. Diluar dari gerakan sosial terdapat pula gejala sosial yang muncul dan melahirkan perubahan sosial yang disebut dengan ranah negara dan ranah ekonomi.

Kajian tentang gerakan mahasiswa bukanlah sesuatu disiplin akademis dan bahkan belum menjadi keahlian khusus yang diakui tetapi kepustakaan tentang bidang ini banyak sekali dan sangat variatif untuk dipandang sebagai suatu bidang studi. Rentetan perjuangan mahasiswa dalam memukul mundur hantu keditatoran dalam sebuah sistem politik merupakan manifestasi kesadaran bahwa hidup dalam tekanan bertolak belakang dengan rasa kemanusiaan dan keadilan pasti akan mendapat perlawanan. Ada adagium yang mengatakan bahwa jika seorang mahasiswa bias atau tidak peduli menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya maka ia adalah bagian dari masalah tersebut (Philips G. Altbach, 1988).

Gerakan mahasiswa tidak semata sebagai kumpulan mitos dan slogan yang selalu didengung-dengungkan para aktivis. Akumulasi hal tersebut justru melenakan mahasiswa dalam zona nyamannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya posisi yang jelas dan tegas dimana mahasiswa berada di tengah masyarakat. Maka untuk melakukan hal tersebut, sebuah analisa tentang posisi mahasiswa secara teoritis sangat dibutuhkan. Pun juga sebagai prakteknya dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat. Jika masyarakat menggeliat gelisah terhadap situasi kehidupan mereka sudah seharusnya mahasiswa peka dan bergegas berdiri paling depan untuk membela. Mahasiswa juga diharapkan tidak terlena oleh pragmatisme dan hedonisme yang mengkerdilkan semangat pembelaan terhadap yang tertindas.

Ada kekuatan nyata dalam sejarah yang dapat memungkinkan masyarakat berubah yaitu gerakan mahasiswa. Tahun 1998, dimasa krisis ini kampus bergolak. Hampir semua kampus di Indonesia serempak berdemonstrasi menuntut perubahan. Keserempakan ini demikian kompak, spontan, dan berani, beberapa dari mereka bahkan telah menjadi korban kekerasan. Kekuatan mereka merupakan kekuatan sejarah, yang dengan hukum dan keharusannya dapat mendobrak segala kemandekan menuju perubahan dan pembaruan (Sindhunata, 2000).

2) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi di Indonesia Pada Tahun 1998

a. Kondisi Sosial dan Politik

Pada tahun 1998 disinilah letak awal akan runtuhnya kekuasaan Soeharto. Indonesia mengalami krisis ekonomi, dan terjadi berbagai kerusuhan, bahkan kerusuhan itu terjadi sebelum tahun 1997-1998. Tahun 1995 adalah awal politik huru hara di Indonesia, karena kerusuhan terjadi di berbagai daerah (Fadli Zon, 2004). Kerusuhan memang terjadi saat jelang runtuhnya Soeharto, didalam kubu ABRI juga terjadi perpecahan dan Rivalitas antara Wiranto dan Prabowo. Kedua orang ini adalah orang terdekat dari Soeharto, Wiranto memiliki jabatan staf dan komando teritori sedangkan Prabowo mendapat jabatan lapangan dan tempur. Ada beberapa pengamat yang mengatakan, rivalitas keduanya sengaja diciptakan oleh Soeharto agar terjadi keseimbangan dan tak ada yang dominan (Fadli Zon, 2004).

Selain kerusuhan yang terjadi dimana-mana dan konflik yang terjadi di internal ABRI, peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 memicu para aktivis dan mahasiswa menuntut keadilan di masa pemerintahan Orde Baru. Kasus penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa ini terjadi ketika para aktivis yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

b. Kondisi Ekonomi

Pada awalnya krisis ekonomi terjadi di Asia yang terjadi di dekade sembilan puluhan setelah fenomena bubarnya Uni Soviet. Sebagaimana dengan bubarnya Uni Soviet, tidak ada yang menduga jika berbagai negara di Asia Timur mengalami krisis ekonomi yang parah. Pada masa itu, negara di Asia Timur memperoleh gelar yang

membanggakan, *“The Miracle of Asia.”*(Denny J.A., 2006) Dibandingkan dengan kawasan Dunia Ketiga lainnya, seperti di Amerika Latin dan Afrika, negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Indonesia, mengalami pertumbuhan ekonomi yang dahsyat. Model pembangunan ekonomi dan politik di kawasan Asia itu telah pula dijadikan percontohan.

Namun diakhir dekade sembilan puluhan, pembalikan citra terjadi. Satu persatu, negara di Asia Timur tumbang. Dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan Indonesia. Di negara yang terakhir ini, krisis ekonomi paling parah. Gelar atas kawasan inipun dibalik menjadi *“The Melt down of Asia.”* Krisis keuangan di Indonesia saat itupun masih berlanjut. Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta. Paket dari IMF sebanyak 23 milyar dollar AS sudah dijanjikan. Namun kurs rupiah atas dollar terus merosot, bahkan pernah mencapai angka diatas Rp 10,000/dollar AS, lebih rendah dari periode sebelum paket bantuan IMF (Denny J.A., 2006).

Kebijakan Paket Oktober (PAKTO) 1988 telah menghasilkan kebijakan yang memudahkan pendirian Bank yakni hanya dengan dana Rp.10 miliar, akibatnya jumlah Bank meningkat dari hanya berjumlah 111 Bank pada 1988 meningkat lebih dari dua kali lipat pada 1995 yakni 240 Bank. Akibatnya, berbagai pelaku usaha dari berbagai macam industri ramai-ramai mendirikan Bank demi mendapatkan dana dari nasabah dan pemerintah untuk membiayai sektor usaha pribadi mereka. Kondisi ini mengakibatkan *cross ownership* antara pemilik Bank dan pemilik perusahaan, akibatnya BMPK (batas minimum pemberian kredit) dengan mudah dapat dilanggar.

Gambar. 1

Bank	Jumlah Asset (dalam triliun Rupiah)	Pemilik
BCA	35.3	Kel. Salim
Bank Danamon	21.9	Kel. Usman Atmadjaja
BII	16.7	Kel. Eka Tjipta Wijaya
BDNI	16.5	Kel. Sjamsul Nursalim
Lippobank	10.2	Kel. Mochtar Riady
Bank Bali	7.6	Kelompok Bali Financial
Bank Niaga	7.3	Kelompok Tirtamas
BUN	7.1	Kel. Bob Hasan/Ongko
Panin Bank	5.4	Mu'min Ali Gunawan
Bank Duta	5.2	Kel. Bob Hasan/Sigit H

Sumber: Dikutip dari berbagai artikel *online*

Pelanggaran BMPK terjadi juga karena maraknya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di sektor perbankan, terlebih apabila pemilik Bank merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan aktor politik penting seperti presiden Soeharto (Ahmad Iskandar, 2011). Sebagai akibat dari *cross ownership* antara pemilik Bank dan pelaku usaha, dana-dana yang dikumpulkan dari para nasabah Bank dan pemerintah kebanyakan disalurkan untuk sektor-sektor usaha mereka yang kurang produktif dengan prospek pasar yang buruk.

Kecenderungan lainnya adalah alokasi pemberian kredit disalurkan di sektor-sektor yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kondisi ekonomi seperti konstruksi, jasa-jasa, industri manufaktur seperti industri otomotif yang kandungan impor produknya sangat tinggi, sementara rasio ekspor terhadap total outputnya sangat kecil (Ahmad Iskandar, 2011).

Karena perbedaan tingkat suku bunga dalam dan luar negeri, serta nilai tukar dolar yang *overvalued* (Rupiah harusnya lebih rendah kursnya) karena menggunakan *fixed exchange rate* maka meminjam dari luar negeri lebih mudah bagi bank-bank yang membiayai kelompok bisnisnya sendiri ini. Modal asing yang didapat dari bank-bank ini kebanyakan disalurkan ke sektor bisnis properti yang sedang *booming* sejak akhir era 1980an. Bisnis properti adalah sektor yang terkena dampak krisis paling parah karena daya beli menurun, naiknya kurs dan kredit konsumen yang macet. Kemacetan sektor properti ini pun menyebabkan perusahaan properti merugi dan terjadi kredit macet terhadap utang luar negeri yang membumbung karena kenaikan kurs yang signifikan (Ahmad Iskandar, 2011).

Krisis finansial Indonesia 1997 berkaitan erat dengan krisis kepercayaan yang disebabkan dari krisis penurunan nilai mata (Depresiasi) uang Bath di Thailand pada 2 Juli 1997, dalam sehari Bath Thailand terdepresiasi hingga 25%, sedangkan kurs rupiah hingga datangnya bantuan IMF telah terlanjur jatuh lebih dari 30%. Dampak psikologis dari krisis kepercayaan terhadap nilai rupiah berdampak kepada perilaku para pengusaha yang kemudian beramai-ramai menukarkan rupiah ke dollar ataupun mata uang asing lainnya yang dinilai kuat, untuk mengamankan kekayaan. Selain itu, pembelian valuta asing ini juga dilakukan untuk membayar hutang jangka pendek. Sementara valuta asing diminati, disisi lain permintaan terhadap rupiah menurun,

disebabkan oleh keengganan investor asing meminjamkan modal kepada perusahaan-perusahaan Indonesia (Tempo, 2007).

Pada tanggal 6 Agustus 1997 sebagai upaya menahan berlanjutnya kejatuhan nilai rupiah, pemerintah kembali menaikkan tingkat likuiditas Bank-bank dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat bank Indonesia/ BI rate dari 11% menjadi 15 %. Namun hal ini berdampak negatif kepada sektor riil karena industri sulit mencairkan dana pinjaman untuk investasi. Artinya aliran modal keluar dari pasar modal dan masuk kedalam bank-bank, dalam waktu beberapa minggu pasar modal telah kehilangan sepertiga nilai kapitalisasinya, akibatnya para *fund manager* menarik investasinya dari Indonesia dan hal ini mengakibatkan keguncangan moneter (Howard Vincent Dick et al., 2002).

Dampak dari hal ini terlihat di pasar saham ditandai dengan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 14 poin. Perusahaan-perusahaan pun melakukan penyesuaian berupa pengurangan kapasitas produksi dan jam produksi dari segi efektifitas, yakni PHK dan efisiensi bahan baku produksi, pengangguran pun meluas. Hal ini membuat kepercayaan pasar kepada pemerintah semakin menurun karena stagnasi *cash flow*, dan krisis likuiditas perbankan. (Maulana Lazuardi, 2005) Kurs rupiah malah semakin memburuk pasca penerapan mekanisme pasar (Maulana Lazuardi, 2005). Lemahnya rupiah membuat utang-utang swasta dalam dollar tidak dapat dibayarkan karena jumlahnya berlipat (Maulana Lazuardi, 2005).

Pada 1 November 1997 pelaksanaan saran IMF berupa penutupan 16 Bank bermasalah oleh pemerintah membawa Indonesia kepada peristiwa penarikan modal besar-besaran dari nasabah. Tidak seperti dilakukan oleh Korea Selatan dan Thailand, penutupan 16 Bank ini tidak disertai sistem penjaminan yang memadai, dalam sidang kabinet tanggal 3 November 1997 pemerintah hanya membayar deposito maksimal Rp. 20 juta, hal ini menyebabkan sejumlah Bank yang terancam ditutup (Tempo, 2007). Pada tanggal 23 Januari 1998 nilai rupiah turun drastis menjadi Rp. 17.000/US\$. (Howard Vincent Dick et al., 2002) Dalam kurang dari setahun, rupiah telah naik lebih dari 8 kali lipat, karena pada pertengahan 1997 nilai masih berada di posisi Rp. 2.510/US\$ (Agus Gede Mahendra, 2000). Krisis ini semakin parah ketika terjadinya *Capital Flight* yaitu pelarian dana ke luar negeri oleh para nasabah, hal ini

membuat nilai rupiah anjlok dan dalam pusaran krisis yang semakin mendalam berbentuk *downward spiral*.

3) Lahirnya Gerakan Reformasi Mahasiswa Tahun 1998

Keberhasilan *social movement* membawa keruntuhan rezim Soeharto pada kala itu, dimana presiden sebagai satu-satunya penguasa di Indonesia dan keberhasilan ini tentu tidak lepas dari gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena seperti yang kita ketahui, saat itu mahasiswa aktif melakukan demo-demo dan berhasil membentuk opini publik, sehingga sebagian masyarakat berpihak pada mereka untuk turut menciptakan reformasi. Namun, dimana adanya gerakan menuju perubahan biasanya ada musuh yang menghadang. Koloni-koloni Soeharto telah banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kala itu demi mempertahankan kedudukan mereka dan ABRI pasang senjata bagi siapa saja yang berani menentang. Penculikan dan pembunuhan pun tidak segan-segan mereka lakukan.

Awalnya, aksi keprihatinan hanya di dalam kampus dan hanya melibatkan segelintir mahasiswa. Di luar kampus, sejumlah elemen ekstra kampus pun masih memprotes sebatas wacana dan sesekali tampil di media massa. Aksi-aksi perlawanan berskala kecil muncul pada Maret 1998, beberapa saat menjelang MPR akan mengukuhkan kembali Soeharto sebagai presiden RI untuk ketujuh kalinya (Ricardi S. Adnan & Arvab Pradiansyah, 1999). Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar.

Keputusan untuk turun ke jalan ini membuat aparat kepolisian beserta militer selalu menjaga ketat setiap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, tak terkecuali aksi-aksi yang berlangsung sepanjang April hingga pertengahan Mei hampir selalu berakhir dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat. Namun kekerasan demi kekerasan itu tidak menyurutkan nyali mahasiswa. Gerakan mahasiswa dalam waktu singkat menjadi tren di kampus-kampus, dimulai dari Universitas Indonesia (UI) lalu menyebar ke perguruan tinggi lain di berbagai kota. Atmosfer gerakan mahasiswa semakin hari semakin besar dan tidak bisa ditahan. Para mahasiswa kemudian menuntut reformasi dengan mengajukan enam agenda, antara lain:

- Suksesi kepemimpinan nasional
- Amendemen UUD 1945
- Pemberantasan KKN
- Penghapusan dwifungsi ABRI
- Penegakan supremasi hukum
- Pelaksanaan otonomi daerah.

Gedung wakil rakyat, yaitu Gedung MPR/DPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998:

1) Demonstrasi Mahasiswa

Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok pro-reformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Moses Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto justru malah berangkat ke Kairo, Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang KTT Non-Blok.

2) Peristiwa Trisakti (Ricardi S. Adnan & Arvab Pradiansyah, 1999)

Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Setelah keadaan semakin panas dan hampir setiap hari ada demonstrasi tampaknya sikap Brimob dan militer semakin keras terhadap mahasiswa, apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulang kali sejak awal orde baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997.

Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisakti di Grogol menuju ke Gedung DPR/MPR di Slipi. Dihadang oleh aparat kepolisian mengharuskan mereka kembali

ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu berlangsung sepanjang sore hari dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Keempat korban meninggal tersebut kemudian didaulat sebagai pahlawan reformasi oleh beberapa kalangan. Selain korban meninggal, puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat juga harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka.

Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, banyak warga yang marah dan melakukan perusakan di daerah Grogol hingga terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak mati mahasiswa. Peristiwa Trisakti ini banyak mengundang simpati dari tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.

3) Kerusuhan 12-15 Mei 1998

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 12-13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kerusuhan ini bukan didominasi oleh mahasiswa, melainkan didominasi oleh warga. Warga yang marah terhadap kebrutalan aparat keamanan atas meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti, mengalihkan kemarahan pada orang Indonesia sendiri yang keturunan Cina. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.

4) Pendudukan Gedung MPR/DPR (Ricardi S. Adnan & Arwab Pradiansyah, 1999)

Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak terbakarnya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan mereka yang utama adalah pengusutan penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya. Kedatangan ribuan mahasiswa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden, namun para mahasiswa tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul

mundur mahasiswa dari gedung DPR/MPR. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari.

Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan menduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan kalau reformasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia.

5) Pengunduran Diri Presiden Soeharto (Muridan S Widjojo & Mashudi Noorsalim, n.d.)

Setelah melihat kondisi yang semakin kacau, terlebih dengan pendudukan gedung MPR/DPR oleh mahasiswa, Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi presiden lagi. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi.

Namun tampaknya tak semudah itu reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habibie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atma Jaya Jakarta yang terletak di Semanggi.

Itulah periodisasi pergerakan mahasiswa yang bersatu melakukan aksi menentang Soeharto sejak pertengahan 1997 sampai mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Keberhasilan mahasiswa ini tidak terlepas dari berbagai unsur pendukung, seperti krisis moneter dan membelotnya para kroni Soeharto yang sering disebut dengan sebutan "brutus" pada waktu itu. Gerakan mahasiswa sesaat sebelum Soeharto lengser ini dapat dikatakan sebagai perilaku yang bersifat kolektif, karena perilakunya cenderung pada perilaku kerumunan aksi dimana aksi demonstrasi

mereka lakukan secara terus menerus dengan mengandalkan mobilisasi massa demi tujuan bersama (Muridan S Widjojo & Mashudi Noorsalim, n.d.)

Dalam kondisi perilaku kolektif, terdapat kesadaran kolektif dimana gagasan dan ide-ide yang awalnya hanya dimiliki oleh sekelompok mahasiswa dapat menyebar dengan begitu cepat sehingga menjadi milik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Kekecewaan dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap pemerintah disambut oleh masyarakat yang menjadi korban dari sistem yang ada. Aksi dari mahasiswa kemudian direspon oleh masyarakat melalui secara sukarela memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang sedang mengadakan demonstrasi. Tuntutan gerakan mahasiswa saat sebelum kejatuhan rezim Orde Baru ini satu tujuan, yakni tuntutan Soeharto untuk mundur. Sehingga tak heran bila gerakan ini dapat dimenangkan oleh mahasiswa, karena kekuatan gerakan mahasiswa semakin nyata terlihat setelah mereka semua dipersatukan melalui satu tujuan yang terfokus.

4) Dampak Gerakan Reformasi Mahasiswa 1998 Terhadap Kehidupan Bangsa

Proses reformasi pada tahun 1998 telah berdampak besar dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Secara umum, terdapat beberapa perubahan sosial yang terjadi:

Pertama, yang paling dirasakan dan dapat dilihat dengan jelas adalah jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Selama berkuasa, rezim Orde Baru selalu mengedepankan tindakan represif dalam menjaga kelanggengan kekuasaannya. Mundurnya presiden Soeharto telah menjadi tahapan awal dari perubahan tersebut. Namun, banyak pula kalangan melihat bahwa mundurnya Soeharto tidak akan memberikan kontribusi terhadap perubahan yang diinginkan.

Kedua, seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru maka berdampak pada struktur pemerintahan. Dalam berbagai tuntutan, mahasiswa menganggap bahwa struktur pemerintahan di masa Orde Baru menjadi instrumen penindasan terhadap masyarakat. Ini jelas sangat dirasakan oleh para mahasiswa yang telah dibungkam melalui pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Selain itu, mahasiswa menilai bahwa aparat negara, militer pada khususnya juga menjadi alat pelanggeng kekuasaan. Oleh karena itu,

tuntutan yang muncul dari mahasiswa adalah mengembalikan posisi militer pada fungsinya. Salah satu contoh perubahan adalah dicabutnya dwifungsi ABRI.

Ketiga, perubahan sistem politik di Indonesia. Walaupun sering dikatakan bahwa paham yang dianut oleh sistem politik Indonesia adalah demokrasi, ini jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan pendapat yang kerap kali dianggap mengganggu stabilitas menjadi hal yang dilarang di masa Orde Baru. Aspirasi politik dari masyarakat kemudian dipersempit dengan sistem tiga partai yang jelas tidak berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu salah satu tuntutan mahasiswa pada tahun 1998 adalah melakukan pemilihan umum (pemilu) dalam waktu dekat. Salah satu contoh perubahan dekat adalah pelaksanaan sistem pemilihan umum langsung yang dilaksanakan pada tahun 2004.

Seperti yang telah disampaikan diatas, perubahan sosial juga akan mempengaruhi nilai-nilai, sikap dan pola perilaku dalam sistem sosial masyarakat (Anas Urbaningrum, 1999). Dalam konteks reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengekangan yang dulu dilakukan oleh rezim Orde Baru diberbagai sektor berangsur-angsur dihilangkan. Sebagai salah satu contoh adalah kebebasan berpendapat sekarang relatif lebih terbuka. Kemudian isu tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia kemudian menjadi salah satu indikator dalam pembangunan. Masyarakat yang dulunya apatis dan cenderung pasif pada sistem politik saat ini mulai terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Sebagai salah satu indikator adalah berdirinya berbagai partai politik di Indonesia.

Kita dapat melihat keberhasilan gerakan mahasiswa dengan sebuah tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan mahasiswa sebagai agen perubahan yaitu bagaimana respon pemerintah terhadap tuntutan yang mereka ajukan. Respon yang dimaksud dapat diamati dalam beberapa bagian, yaitu respon akses, ketika pihak sasaran mendengarkan tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan, respon kebijakan, kesetiaan pihak sasaran mengadopsi tuntutan gerakan menjadi kebijakan barunya, respon output, yakni ketidakpuasan anggota gerakan protes, dan dukungan masyarakat terhadap gerakan tersebut (Anas Urbaningrum, 1999).

Jika parameter keberhasilan gerakan mahasiswa ini menggunakan tolak ukur tersebut, maka dapat dikatakan gerakan tersebut berhasil. Masyarakat mendukung

penuh aksi yang dilakukan mahasiswa pada masa itu, dan tujuan mereka satu, yaitu menumbangkan rezim Soeharto dan muncul euforia di negara ini. MPR/DPR pun merespon tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa. Dan ini menandakan Indonesia telah memasuki babak baru dalam perpolitikan, dimana ruang publik terbuka seluas-luasnya babak ini kemudian kita sebut dengan era reformasi.

D. KESIMPULAN

Mahasiswa dapat tampil sebagai aktor perubahan karena beberapa faktor: *pertama*, mahasiswa merupakan entitas yang memiliki kelebihan tersendiri karena pendidikan yang diperoleh mampu menjadikan dirinya sebagai segmen yang lebih maju jika dibandingkan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, ia berpotensi untuk menggerakkan kondisi menuju ujung tombak dari suatu perubahan sosial politik. *Kedua*, munculnya gerakan mahasiswa dalam konteks perilaku kolektif tidak terlepas dari fluktuasi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan aspek spontanitas yang sementara nilai-nilai baru belum terbentuk. *Ketiga*, ketika infrastruktur dan suprastruktur politik negara tidak berfungsi secara maksimal, mendorong mahasiswa tampil sebagai kekuatan responsive terhadap kondisi. Misalnya, terjadi penindasan struktural yang diikuti oleh krisis sistematis di bawah suatu rezim pemerintahan (Adi Suryadi Culla, 1998). Oleh sebab itu, gerakan mahasiswa 1998 dapat dikatakan sebagai gerakan sosial yang menuntut reformasi dan perubahan dalam sistem politik Indonesia. Tuntutan perubahan tersebut lahir karena melihat kebijakan yang ada bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum dibawah kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru.

REFERENSI

- Adi Suryadi Culla. (1998). *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Gede Mahendra. (2000). *"Krisis Perekonomian Indonesia 1997/98 Sebagai faktor utama kejatuhan Orde baru."*. Skripsi Universitas Indonesia.
- Ahmad Iskandar. (2011). *Obligasi Rekapitalisasi Perbankan*. PT. Dian Rakyat.

- Anas Urbaningrum. (1999). *Mahasiswa Menggugat*. Pustaka Hidayah.
- Darmawan Triwibowo. (2006). *Gerakan Sosial; Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. LP3ES.
- Denny J.A. (2006). *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. LKiS.
- Donatella della Porta, & Mario Diani. (2006). *Social Movements In Introduction*. Blackwell Publishing Ltd.
- Fadli Zon. (2004). *Politik Huru Hara Mei 1998*. Institute For Policy Studies.
- Francois Raillon. (1985). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. LP3ES.
- Howard Vincent Dick, J. Thomas Lindblad, & Thee Kian Wee. (2002). *The Emergence of a National Economy: an Economic History of Indonesia 1800-2000*. University of Hawaii Press.
- Maulana Lazuardi. (2005). *“Peran IMF dan Negara: Tinjauan Kasus Dalam Penyelesaian Krisis Ekonomi di Thailand dan Indonesia Tahun 1997-2000”* . Skripsi Universitas Indonesia.
- Muridan S Widjojo, & Mashudi Noorsalim. (n.d.). “Perlawanan Petanda, Politik Semiotik Gerakan Mahasiswa, ” . *Kebijakan Kebudayaan Di Masa Orde Baru. 2001. Jakarta, Pusat Pengembangan Kemasyarakatan Dan Kebudayaan-LIPI Dan Ford Foundation*.
- Philips G. Altbach. (1988). *Politik dan Mahasiswa; Perspektif dan Kecendrungan Masa Kini*. Gramedia.
- Ricardi S. Adnan, & Arvab Pradiansyah. (1999). *Gerakan Mahasiswa untuk Reformasi; Kisah Perjuangan Reformasi* (Selo Soemardjan, Ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Sindhunata. (2000). *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Penerbit Kanisius.
- Tempo. (2007). 10 Tahun Krisis Ekonomi. *Edisi Khusus* .